



REVISI 2022

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



**BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR:0767/I5.6/KP.10.00/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020—2024

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020—2024;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2020--2024.
- KESATU** : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2024.
- KEDUA** : Menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020—2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020—2024, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA** : Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020—2024 dipergunakan sebagai pedoman untuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada 6 Juni 2022

Kepala Balai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP. 196801201993032002



KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) 2020—2024 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini menjadi pedoman dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2020 hingga 2024. Selain itu, Renstra ini menjadi bahan acuan penyusunan Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berikutnya.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, struktur, dan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2020—2024. Karena Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Renstra yang digunakan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan serta evaluasinya mengacu pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

Yogyakarta, 6 Juni 2022

Kepala,



Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	6
1.2 Pokok-Pokok Perubahan Renstra Balai Bahasa 2020--2024.....	17
1.3 Potensi dan Permasalahan	19
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	23
2.1 Visi.....	23
2.2 Misi	23
2.3 Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	24
2.4 Sasaran Strategis.....	24
2.5 Sasaran Program.....	25
2.6 Tujuan Kegiatan	26
2.7 Sasaran Kegiatan	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	30
3.1 Arah Kebijakan.....	30
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	30
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek	33
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	43
3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa	35
3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program.....	40
3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.....	43
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	48
3.3 Kerangka Regulasi.....	51
3.4 Kerangka Kelembagaan	53
3.4.1 Struktur Organisasi	54
3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	54

3.4.3 Reformasi Birokrasi.....	56
3.4.4 Pemenuhan Sarana Prasarana.....	59
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	60
4.1 Target Kinerja.....	60
4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021	60
4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024	61
4.2. Kerangka Pendanaan	62
BAB V PENUTUP.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

"Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeang Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia"

(Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Hal tersebut selaras dengan dua misi presiden, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Pembangunan SDM yang dimaksud dalam arahan presiden itu: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Arahan presiden tersebut selaras dengan agenda pembangunan 3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain agenda pembangunan SDM, agenda pembangunan 4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan) juga menjadi salah satu agenda penting yang harus dilaksanakan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *bhinneka tunggal ika*. Untuk memperkuat *bhinneka tunggal ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanam-kan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam melaksanakan amanah Agenda

Pembangunan 4, yaitu revolusi mental dan pemajuan kebudayaan.

BPP Bahasa juga berupaya mewujudkan agenda pembangunan 7, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dengan (1) menerapkan sistem merit (aspek profesionalitas ASN); (2) menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (aspek kelembagaan); (3) membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT), menyediakan produk dan layanan yang mudah diakses melalui laman BPP Bahasa (e-service) atau berbagai aplikasi (aspek pelayanan publik); dan (4) menerapkan SAKIP, penganggaran yang terpadu dan andal, serta laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (aspek akuntabilitas).

Dalam melaksanakan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemendikbudristek, BPP Bahasa berpedoman pada amanat regulasi tentang pengelolaan bahasa sebagai berikut.

Amanat Regulasi tentang Pengelolaan Bahasa



Selanjutnya, dalam melaksanakan amanah perundang-undangan, BPP Bahasa melaksanakan tugas dan fungsi dengan sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa kebijakan baru yang mendorong BPP Bahasa melakukan penyesuaian dan penyempurnaan rencana strategis, yaitu

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Perubahan rencana strategis Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan surat edaran bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan RI Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Renstra BPP Bahasa ini disusun sesuai pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2020—2024.

Rencana strategis ini lebih mengkrystalkan peran BPP Bahasa dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Kemendikbudristek sebagai upaya mengejawantahkan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam penerapannya, Renstra BPP Bahasa dijadikan acuan oleh satuan kerja

di lingkungan BPP Bahasa dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja masing-masing agar selaras dan sejalan dalam pencapaian program prioritas BPP Bahasa.

Di sisi lain, seperti telah dijelaskan di dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024, untuk menghadapi situasi kebahasaan yang kompleks secara nasional dan daerah diperlukan adanya suatu garis kebijakan yang dapat mengatur dengan cermat, tepat, dan arif bijaksana. Dalam kaitan itulah, sebagai suatu garis kebijakan kebahasaan dan kesastraan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020--2024 ini disusun dan ditetapkan.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020--2024 ini disusun berdasarkan beberapa prinsip dasar atau paradigma pembangunan kebahasaan dan kesastraan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020--2024.

Pertama, paradigma yang berkaitan dengan pembangunan kebahasaan, antara lain, adalah (1) bahasa sebagai sarana berpikir, (2) bahasa sebagai sarana berkomunikasi, (3) bahasa sebagai pengantar pendidikan nasional, (4) bahasa sebagai pembentuk karakter bangsa, (5) bahasa sebagai alat strategi dan diplomasi, (6) bahasa sebagai kebanggaan dan citra bangsa, (7) bahasa sebagai pemersatu bangsa, (8) bahasa sebagai sarana ekspresi, (9) bahasa sebagai basis industri kreatif, dan (10) bahasa sebagai penghela pembangunan manusia Indonesia.

Kedua, paradigma yang berkaitan dengan pembangunan kesastraan, antara lain, adalah (1) sastra sebagai peneguh jati diri, (2) sastra sebagai penumbuh solidaritas kemanusiaan, (3) sastra sebagai sarana pengungkapan wawasan ke-Indonesiaan dan daerah, (4) sastra sebagai sarana aktualisasi nilai kehidupan, (5) sastra sebagai penumbuh sikap dan penghalusan perasaan dan budi pekerti, dan (6) sastra sebagai sarana pengungkapan budaya dan kearifan lokal.

Dari uraian di atas, pembangunan bidang kebahasaan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga strategis dalam pembentukan SDM tersebut. Berikut ini kondisi umum, permasalahan dan potensi, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.1 Kondisi Umum

a. Capaian 2015—2019

Seperti tertuang di dalam laporan kinerja Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat delapan sasaran kegiatan selama periode 2015—2019, yakni meningkatnya (1) Kosakata Bahasa Indonesia, (2) Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan, (3) Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, (4) Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, (5) Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra, (6) Jumlah Ruang Publik yang Terkendali, serta (7) Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Balai Bahasa. Uraian capaian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

(SK 1) Kosakata Bahasa Indonesia



Sasaran kegiatan pertama adalah meningkatnya kosakata bahasa Indonesia, sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Kosakata Indonesia. Inventarisasi kosakata yang digunakan untuk memperkaya jumlah lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan mengembangkan berbagai kamus (ekabahasa, dwibahasa, etimo-logi, dan sebagainya).

Target inventarisasi kosakata di Yogyakarta yang tertuang dalam Renstra 2015—2019 sebanyak 1.900 lema. Secara akumulatif sampai dengan 2019 capaian IKK Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia adalah sebesar 190,55% atau 3.620 lema.

(SK 2) Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan

Sasaran kegiatan kedua, yaitu meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan, diukur melalui IKK (1) Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra dan (2) Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra.



IKK 1

IKK pertama dicapai melalui kegiatan pengkajian dan penelitian kebahasaan dan kesastraan dengan target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak 63 naskah. Secara akumulatif 2015—2019 capaian IKK ini sebesar 104,76 % atau 66 naskah. Hasil pengkajian dan penelitian itu akan dijadikan bahan rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan oleh pemangku kepentingan. Selain itu, hasil

pengkajian dan penelitian itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemertabatan dan pelestarian bahasa dan sastra.



IKK 2

Sementara itu, IKK kedua dicapai melalui kegiatan publikasi ilmiah bahasa dan sastra dengan target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak 14 terbitan. Sampai akhir renstra ini, IKK bisa mencapai 92,86 % atau 13 terbitan.

rtrtrtret1

(SK 3) Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

Sasaran kegiatan ketiga yaitu Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, diukur



melalui IKK (1) Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra dan (2) Jumlah Bahan Ajar BIPA.

IKK pertama dicapai melalui kegiatan penerbitan bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra. Target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak 96 naskah dan sampai dengan akhir periode renstra ini tercapai 146,88% atau sebanyak 141 naskah.

IKK kedua dicapai melalui kegiatan penyusunan bahan ajar BIPA dengan target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak 1 naskah. Sampai dengan akhir periode renstra ini tercapai 100% atau 1 naskah.

rtrtrtret1

Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran



Sasaran kegiatan keempat, ini diukur melalui indikator kinerja jumlah penyusunan instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan target

rtrtrtret1

yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak satu naskah. Sampai dengan akhir renstra ini tercapai 100% atau satu naskah.

(SK 5) Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra



rtrtrtret1

IKK 1



rtrtrtret1

IKK 2

dan Sastra dengan target renstra 2015—2019 sebanyak 15.917 orang. Secara akumulatif capaian IKK ini sampai akhir periode renstra adalah sebesar 142.90 % atau 22.745 orang.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui IKK (1) Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina Dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra dan (2) Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra.

IKK pertama dicapai melalui kegiatan Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia dan sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional dengan target yang tertuang dalam renstra 205—2019 sebanyak 7.217 orang. Secara akumulatif, capaian IKK ini sampai dengan akhir periode renstra adalah sebesar 1113,91% atau 8.221 orang.

IKK kedua dicapai melalui kegiatan Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa

(SK 6) Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali



Sasaran kegiatan keenam, yaitu meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali, mempunyai dua IKK, yaitu (1) Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya dan (2) Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya.



rtrtrtret1

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya mempunyai target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak 463 lembaga dan sampai akhir periode renstra ini bisa mencapai 100% atau 463 lembaga.

Sementara Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya mempunyai target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak

240 lembaga dan sampai akhir periode renstra ini bisa mencapai 100% atau 240 lembaga.



Jarannya Layanan Dukungan Manajemen s di Lingkungan Balai Bahasa

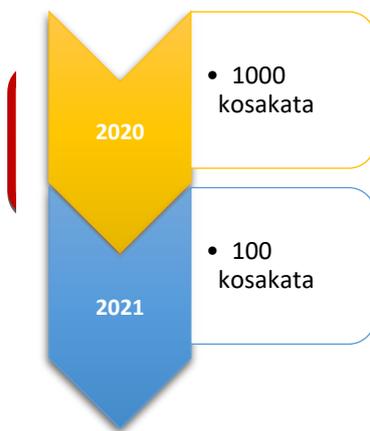
Sasaran kegiatan ketujuh ini mempunyai tiga IKK, yaitu layanan dukungan manajemen eselon I, layanan internal, dan layanan perkantoran. Setiap IKK mempunyai target yang tertuang dalam renstra 2015—2019 sebanyak 1 layanan dan sampai dengan akhir periode renstra masing-masing IKK tercapai 100% atau 1 layanan.

Secara umum target renstra tahun 2015—2019 telah tercapai dengan hasil yang baik, kecuali di sasaran kegiatan kedua, meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan dan IKK kedua, jumlah publikasi ilmiah bahasa dan sastra pada tahun 2019 hanya tercapai 75% atau tiga terbitan dari target empat terbitan. Ketidak-tercapaian ini disebabkan adanya penggabungan terbitan untuk jurnal *Widyasastra*.

b. Capaian 2020—2021

Periode 2020—2021, Balai Bahasa Provinsi DIY seperti tertuang di dalam laporan kinerja, terdapat enam sasaran kegiatan, yakni (1) Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia, (2) Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, (3) Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, (4) Meningkatnya

Jumlah Penutur Bahasa Terbina, (5) Telindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah, (6) Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Uraian capaian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.



Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

Sasaran kegiatan pertama, yaitu meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia, sasaran kegiatan ini diukur menggunakan IKK Jumlah Kosakata Bahasa

Indonesia. Target IKK ini yang tertuang dalam renstra 2020—2021 sebanyak 1.100 kosakata dan sampai dengan akhir 2021 tercapai 100% atau 1.100 kosakata.



Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

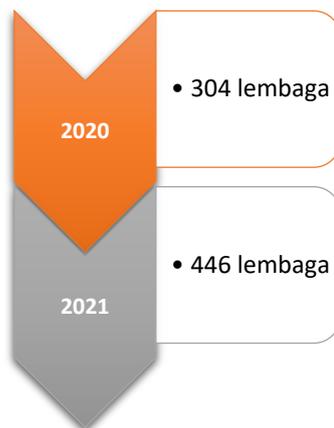
Sasaran kegiatan kedua, yaitu terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia, sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja, yakni IKK Jumlah Rekomendasi

Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian. Adapun capaian Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian yang dicapai Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 sebanyak satu dokumen sedangkan pada tahun

2021 nomenklatur IKK ini sudah tidak ada sehingga pada tahun 2021 tidak ada capaian untuk IKK ini.

(SK 3) Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia

di Ruang Publik

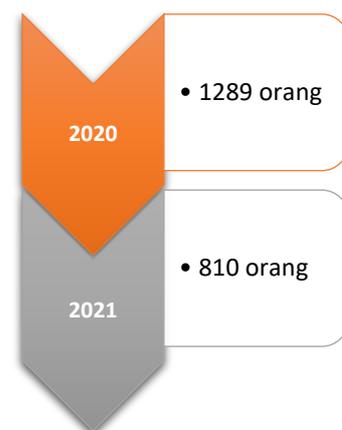


Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran

Sasaran kegiatan ketiga ini diukur menggunakan IKK Jumlah Lembaga Penggunaan Bahasa yang Terbina. Target IKK yang tertuang dalam renstra 2020—2021, untuk IKK yang pertama sebanyak 600 lembaga dan sampai dengan akhir 2021

tercapai 125 % atau 750 lembaga.

(SK 4) Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina



Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran

Sasaran kegiatan keempat, yaitu meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina, sasaran ini diukur dengan IKK Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra. Target IKK ini yang tertuang dalam renstra untuk tahun

2020—2021 sebanyak 1.883 orang dan sampai dengan akhir 2021 tercapai 112,5 % atau 2.119 orang.

(SK 5) Telindungnya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah

Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra

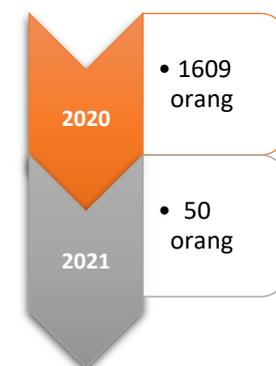
rtrtrtret1



Sasaran kegiatan ini diukur dengan tiga IKK, yaitu (1) Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah, (IKK 1) Jumlah Penutur

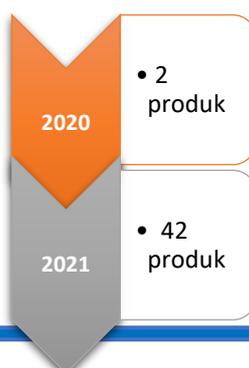
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra

rtrtrtret1



Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah, dan (3) Jumlah Produk Sastra Terkembangkan.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah mempunyai target yang tertuang dalam renstra 2020 sebanyak 605 produk dan (IKK 2) sampai 102 % atau 615 orang, sedangkan untuk tahun 2021 tidak dianggarkan dalam perencanaan.



Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah mempunyai target yang

tertuang dalam renstra 2020--2021 sebanyak 1610 produk dan tercapai 103 % atau 1659 orang.

IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Produk Sastra Berkembang mempunyai target yang tertuang dalam renstra 2020--2021 sebanyak 23 produk dan sampai dengan akhir 2021 tercapai 191 % atau 44 produk.

(SK 6) Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Sasaran kegiatan keenam, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sasaran kegiatan ini diukur menggunakan IKK (1) Persentase Satker di BPP Bahasa yang Memiliki Predikat Sakip minimal BB dan (2) Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91.

Target IKK yang tertuang dalam renstra 2020—2021, untuk IKK yang pertama sebanyak satu layanan dengan target 2020 dan 2021 dengan nilai BB dan sampai dengan akhir 2021 tercapai 100 % dengan nilai A atau satu layanan.

IKK 1

Sedangkan IKK Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91, untuk tahun 2020 target 92 tercapai 94. Untuk tahun 2021 target 92 tercapai 91.

IKK 2

1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020—2024

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020—2024 direviu dan diselaraskan agar mampu menjawab tantangan perubahan. Hadirnya beberapa kebijakan mutakhir ditindaklanjuti dengan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renstra. Dalam dokumen ini, perubahan dilakukan terhadap beberapa hal berikut.

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
1.	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian 2015—2019	Penajaman Penambahan infografis
	1.2 Permasalahan dan Potensi	Penjelasan permasalahan berdasarkan sasaran program	Menggunakan analisis SWOT
2.	BAB II Visi, Misi, dan Tujuan		
		a. Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbudristek, BPP Bahasa, dan Balai Bahasa DIY	Tetap

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra		
		Semula	Menjadi	
		b.	Narasi misi serupa dengan visi	Tetap
		c.	Tujuan kegiatan	Penajaman Tujuan Kegiatan
		d.	Sasaran kegiatan	Penajaman Sasaran Kegiatan
		e.	-	Memunculkan <i>cascading</i> antara SS, SP, dan SK
		f.	Terdapat tata nilai Balai Bahasa Provinsi DIY	Dihapus
3.	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan			
		a.	Arah kebijakan BPP Bahasa disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada tiga prioritas (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
		b.	Strategi pelaksanaan program disajikan secara umum	Strategi pelaksanaan program diuraikan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		c.	Kerangka regulasi belum mencakupi kebutuhan mutakhir	Penambahan beberapa usulan dalam kerangka regulasi, termasuk tentang Widyabasa
		d.	Kerangka kelembagaan belum memunculkan perlunya kenaikan eselonisasi UPT	Kerangka kelembagaan dibuat lebih spesifik berdasarkan kriteria tertentu, misal jabatan atau pangkat golongan
4.	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan			
		Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2020		Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2022 Sasaran dan indikator dipertajam dengan mengacu pada tiga prioritas utama BPP

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
			Bahasa (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
5.	BAB V Penutup		
		-	Perubahan redaksional
6.	Lampiran		
		Definisi operasional	Pembaharuan definisi operasional
			Cascading
			Matriks Perubahan SK

1.3 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teridentifikasi sebanyak 34 faktor yang tersebar pada empat klaster, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Berikut ini adalah keseluruhan faktor tersebut.

A. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Tersedianya dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap.
- b) Lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di DIY.
- c) SDM yang ahli dalam bidang bahasa dan sastra serta SDM yang ahli dalam bidang dukungan manajemen.
- d) Balai Bahasa memiliki banyak produk (*output*) yang dapat dijadikan bahan baku (*outcome*) untuk pengembangan produk

lainnya. Ada sekitar 500 produk terbitan yang sudah dikeluarkan oleh Balai Bahasa yang dapat dijadikan bahan literasi oleh masyarakat umum.

- e) Tersedianya produk kodifikasi sebagai penunjang bahan literasi berbahasa Indonesia yang terintegrasi dengan TIK.
- f) Balai Bahasa memiliki perpustakaan khusus tentang bahasa dan sastra.
- g) Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta memiliki program fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA.
- h) Tersedianya sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang modern, mutakhir, adaptif, dan ramah pengguna serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia.
- i) Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai.

2) Kelemahan

- a) Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi.
- b) Jumlah SDM yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lembaga/masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan (antara lain karena SDM berpindah ke BRIN sebanyak 15 orang).
- c) SDM belum memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat.
- d) Standar pengajaran BIPA belum teraplikasikan dengan baik.
- e) Belum semua produk dan layanan kebahasaan termanfaatkan dalam mendukung peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.
- f) Belum ada evaluasi keberhasilan program perlindungan bahasa daerah.

- g) Produk kodifikasi sebagai penunjang bahan ajar untuk internasionalisasi bahasa Indonesia dan literasi berbahasa daerah masih kurang.
- h) SOP belum mutakhir dan belum diimplementasikan secara maksimal.

B. Faktor Eskternal

1) Peluang

- a) Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa Bahasa.
- b) Pemda DIY memiliki UU Keistimewaan dan memiliki kegiatan khusus mengenai perlindungan bahasa dan sastra.
- c) Adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyosialisasikan dan menyebarkan produk kebahasaan dan kesastraan melalui media digital, internet, dan lainnya.
- d) Literasi membaca menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) terhadap siswa Indonesia.
- e) Banyak masyarakat/penulis yang antusias mengikuti sayembara penulisan buku pengayaan literasi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f) Banyak komunitas literasi yang aktif melakukan praktik baik berliterasi guna meningkatkan budaya literasi masyarakat.
- g) Peningkatan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda yang terseleksi sebagai Duta Bahasa, dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra.
- h) Permintaan masyarakat terhadap layanan Ahli Bahasa cukup banyak.
- i) Lembaga bahasa BIPA dan pemelajar BIPA di DIY cukup banyak.

- j) Layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang siap dan terbuka bagi semua kalangan.

2) Tantangan

- a) Stabilitas politik dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b) Dominasi bahasa asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- c) Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
- d) Ada ancaman peretas yang akan meretas laman, aplikasi, maupun platform digital milik Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta.
- e) Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah masih kurang.
- f) Pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami
- g) Koneksi jejaring internet yang tidak stabil di sebagian wilayah uji di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dari setiap faktor pada analisis SWOT di atas. Ditetapkan masalah dan potensi prioritas yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di Balai Bahasa Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

Masalah

1. Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada tersebut belum sepenuhnya terimplementasi.
2. Sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah masih kurang.

3. Belum semua produk dan layanan kebahasaan dimanfaatkan untuk mendukung tupoksi.
4. Keterbatasan SDM dari segi jumlah dan kemampuan tentang kebahasaan dan kesastraan.

Strategi

1. Penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan.
2. Mendorona sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah melalui program kegiatan Balai Bahasa DIY.
3. Meningkatkan kualitas produk dan layanan kebahasaan dan sosialisasi ke pihak-pihak terkait untuk mendukung tupoksi.
4. Peningkatan kualitas SDM.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020--2024 yang mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020--2024. Adapun visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kemendikbudristek tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.”

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.*

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki misi:

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengaruh utama bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.

4. Mengoptimalkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.3 Tujuan Balai Bahasa Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, dalam hal pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan. Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan

1. Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;
2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Peningkatan kelestarian bahasa daerah
4. Penguatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang parti-sipasif, transparan, dan akuntabel

2.4 Sasaran Strategis

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra pada tahun 2024, yaitu

1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan; dan
2. Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator keberhasilan yang disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

2.5 Sasaran Program

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan empat sasaran program tahun 2021—2024. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

2.6 Tujuan Kegiatan

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan dengan penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;
2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Peningkatan kelestarian bahasa daerah
4. Penguatan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan untuk membantu mencapai tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dalam kerangka pengukuran ketercapaian tujuan tersebut diperlukan indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator kinerja tujuan ditentukan dalam tabel sebagai berikut.

Tujuan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	72
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	91,99
Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	50
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20,54
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

2.7 Sasaran Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Balai Bahasa menetapkan enam sasaran kegiatan tahun 2021—2024. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP minimal BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Berdasarkan Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang selaras dengan perubahan rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan capaian 2022—2024 sebagai berikut.

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	40	41	43
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	688	709	731
4	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	14	14	14
5	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	125	125	125
6	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan	Produk	15	97	97
7	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat Sakip Balai Bahasa DIY	Predikat	BB	BB	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa DIY	Skor	91	91	91

Berikut *cascading* antara Sasaran Strategis, Sasaran Program/Tujuan Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis	Sasaran Program/Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
		Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA
		Tersedianya produk diplomasi bahasa
Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	
Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi yang Partisipasif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020—2024 diselenggarakan melalui tujuh agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Ketujuh agenda pembangunan tersebut ialah

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan di atas, Kemendikudristek berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda 3, 4, dan 7. Ketiga agenda tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Sementara itu, dari tiga agenda pembangunan yang didukung oleh Kemendikbudristek, terdapat dua agenda yang disokong oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu agenda 4 dan 7. Keduanya diuraikan sebagai berikut.

Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa program prioritas dan kegiatan prioritas. Salah satu program dan kegiatan tersebut ialah peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas yang salah satu kegiatan utamanya berkaitan erat dengan program kebahasaan.

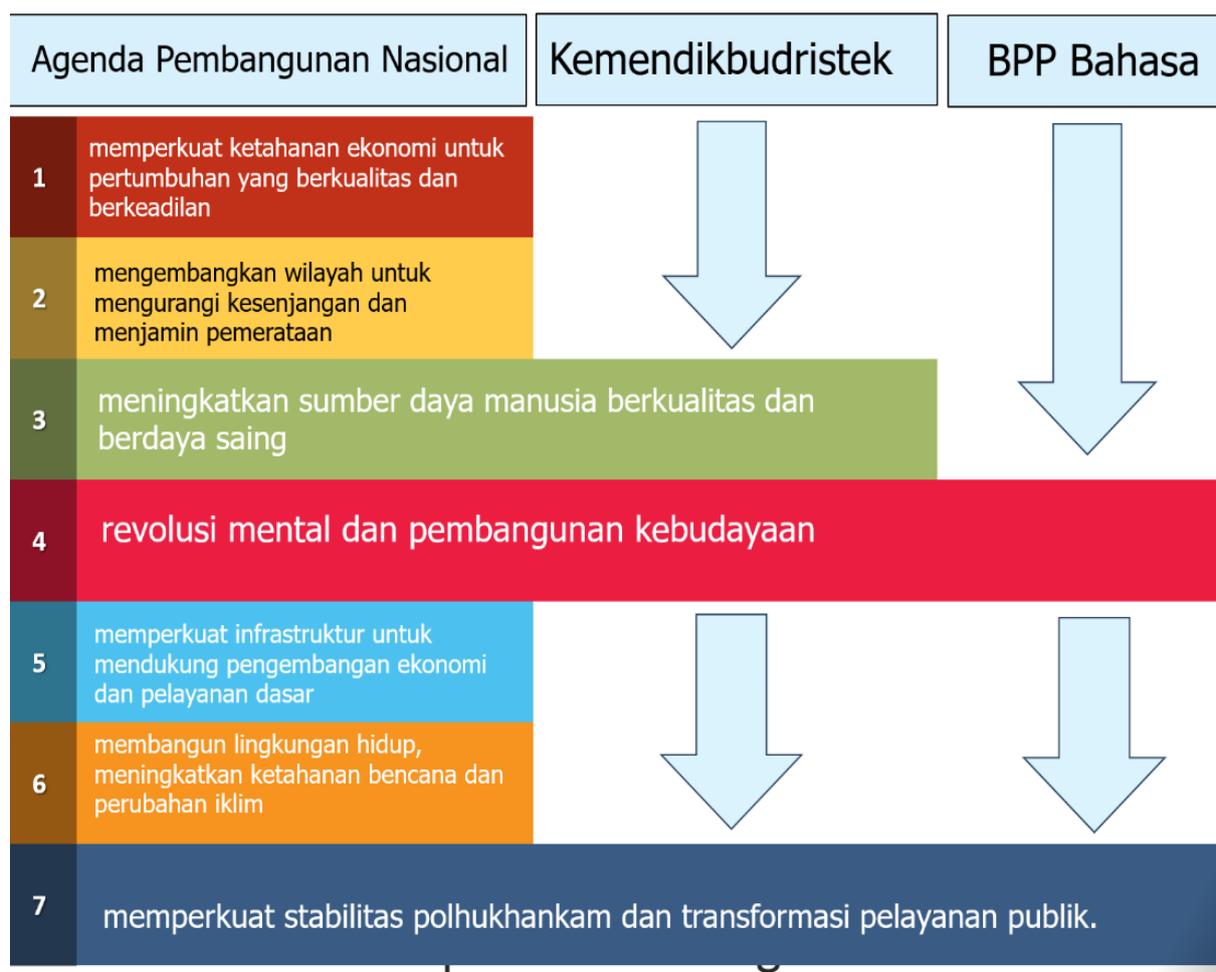
No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1	Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	SS 3: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

Agenda Pembangunan 7:

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut.

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
1.	Penguatan manajemen aparatur sipil negara	SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
2.	Penataan kelembagaan dan proses bisnis	
3.	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	
4.	Transformasi pelayanan publik	

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek dalam menopang agenda pembangunan ditampilkan dalam gambar berikut ini.



3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Secara garis besar, Kemendikbudristek mengukung platform **Merdeka Belajar** sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi Pendidikan.
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan.

5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Strategi yang dikembangkan secara khusus untuk mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kemendikbudristek terurai dalam tabel berikut ini.

No.	Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi	
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		
1.	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam Pendidikan	
	a.	meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
	b.	meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
	c.	Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;
	d.	mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana Pendidikan karakter;
	e.	mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
	f.	meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal
	g.	memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.
2.	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional	
	a.	menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;
	b.	meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia

No.	Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi	
	c.	meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (friends of Indonesia), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	a.	memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
	b.	melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
	c.	Mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
	d.	Mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	e.	memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
	f.	reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
	g.	meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan
	h.	meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah
	i.	mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah
	j.	mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kemendikbudristek dan BPP Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dan BPP Bahasa, terutama

dalam mewujudkan *pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



Fokus kebijakan pertama ialah *penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan*. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Balai Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk

penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Balai Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaan lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.



Fokus kebijakan kedua ialah *pelindungan bahasa dan sastra daerah*. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa

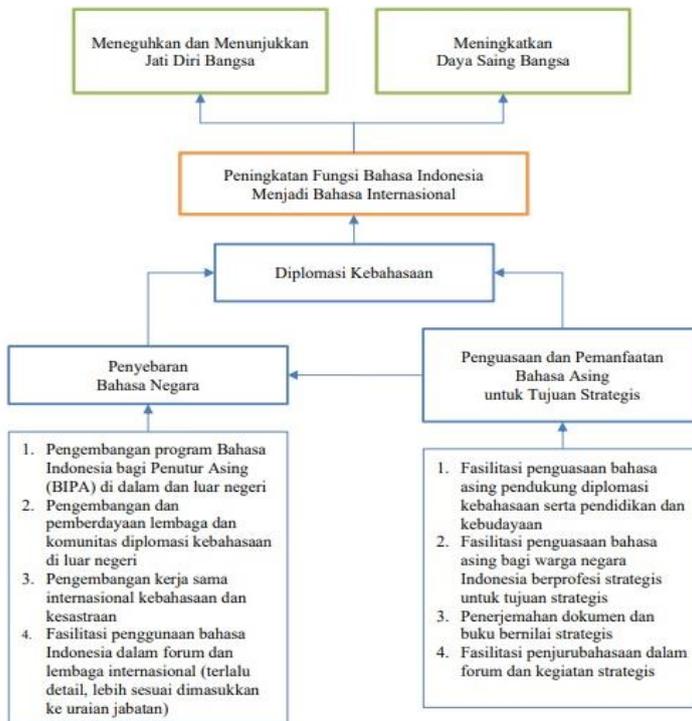
daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas perlindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan *internasionalisasi bahasa Indonesia*. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi *Lingua Franca Plus* ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa

melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan



Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan

koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA di dalam negeri.

Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Balai Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Penerjemahan buku dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Balai Bahasa secara khusus maupun di masyarakat.

3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa sebagai UPT BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)**. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan Balai Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Fungsional

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

Melalui prinsip ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam 'satu atap-satu rangkaian' mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi

kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Kelompok Kepekaran dan Layanan Profesional



Selanjutnya, dengan mengacu pada tiga agenda utama Balai Bahasa, KKLK bekerja di bawah koordinasi satuan kerja pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut.

No.	Bidang	KKLP		Pengampu
1.	Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	a.	Perkamusan dan Peristilahan	Pusbanglin
		b.	Literasi	Pusbin
		c.	Pembinaan dan Bahasa Hukum	Pusbin
		d.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Pusbin
2.	Pelindungan Bahasa Daerah	a.	Pelindungan dan Pemodernan	Pusbanglin
3.	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	a.	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pustanda
		b.	Penerjemahan	Pustanda

Arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa.

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kemendikbudristek	Arah Kebijakan Balai Bahasa	Strategi	Pelaksana
1.	Peningkatan budaya literasi	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;	Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan	Meningkatkan kualitas program kebahasaan dan kesastraan melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)	1. KKLP Perkamusan dan Peristilahan 2. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 3. KKLP Literasi 4. KKLP UKBI
2.	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancan nasional dan internasional;	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional		1. KKLP BIPA 2. KKLP Penerjemahan
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Pelindungan bahasa daerah		KKLP Pellindungan dan Pemodernan

3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan)**, terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun. Pada tahun 2022, BPP Bahasa mencetak dan mengirimkan buku pengayaan sebanyak 12.887.162 eksemplar yang didistribusikan ke 13.572 sasaran (PAUD dan SD) di wilayah 3T. Pencetakan dan pengiriman buku pengayaan dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan buku. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 dan tambahan anggaran dari BA BUN. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru,

dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi para pegiat bahasa dan sastra. Dari komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan komunitas sastra bervariasi. Sebagian di antaranya sangat potensial dan prospektif dalam menggembleng bibit-bibit penulis muda. Untuk komunitas yang berpotensi menjadi wahana kreatif itulah, pemerintah perlu mengulurkan tangan agar bakat-bakat yang ada tidak hilang karena kurangnya sarana, prasarana, maupun kegiatan. Peran pemerintah dalam rangka memberdayakan komunitas-komunitas seperti ini sangat diharapkan sehingga komunitas dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2023 juga terdapat agenda penting, yaitu **Kongres Bahasa Indonesia XII**. Kongres Bahasa Indonesia (KBI) merupakan forum akbar kebahasaan yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun. Kongres pertama dilaksanakan di



Surakarta pada tahun 1938, sedangkan kongres terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018. Dalam forum ini dibahas perkembangan mutakhir ilmu kebahasaan dan kesastraan. Dari forum ini dihasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan.

Sementara itu, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk

kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, peluasan pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pendampingan SD dan PAUD dalam pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, terdapat agenda peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*). Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 Februari setiap tahun. Peringatan itu menandai kepedulian warga dunia terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian lama kian mengkhawatirkan. Bahkan, secara khusus PBB menetapkan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah untuk menggerakkan semua pemangku kepentingan agar bersama-sama melestarikan bahasa daerah. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2023 Indonesia bersama dengan UNESCO akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegiatan diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Puncak peringatan diagendakan di markas UNESCO di Paris, Prancis dengan menampilkan Mendikbudristek sebagai pembicara kunci pada forum tersebut.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan** penginternasionalan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan

melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Penyediaan gedung/kantor bagi UPT, (2) Penyelesaian regulasi tentang jabatan fungsional Widyabasa, (3) Peningkatan kompetensi pegawai, dan (4) Penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, dan (5) Evaluasi program 2020—2024 (termasuk evaluasi KBI).

Berkaitan dengan penyediaan gedung/kantor bagi UPT (balai/kantor bahasa), prioritas pertama ditujukan pada UPT yang telah memperoleh izin prinsip dari Presiden untuk membuka blokir moratorium pembangunan gedung/kantor. Dukungan pendanaan bagi UPT-UPT tersebut perlu diprioritaskan pada tahun 2023. Bagi UPT lain, upaya penyediaan tanah/gedung/kantor dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan data, baik izin prinsip maupun RKBMN. Pada akhir periode Renstra, diharapkan semua UPT telah menempati gedung/kantor yang layak karena UPT tersebut merupakan garda terdepan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa di masyarakat. Satuan-satuan kerja tersebut mengemban berbagai amanat regulasi. Luas wilayah kerja tiap UPT juga sangat luas (satu sampai dua provinsi). Unit-unit tersebut merupakan wajah BPP Bahasa (Kemendikbudristek) di daerah sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Dengan fasilitas yang memadai, UPT tersebut dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat dan lebih bermartabat sebagai representasi Kemendikbudristek.

Berkaitan dengan jabatan fungsional Widyabasa, perlu ditempuh langkah ekstra untuk menyelesaikan semua regulasi yang diperlukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi kemunculan jabatan fungsional Widyabasa sebagai salah satu strategi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme SDM yang memiliki kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inisiasi tentang jabatan fungsional Widyabasa merupakan langkah

strategis untuk mengisi rumpang nama kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dari segi pelaksanaan tugas dan kepakarannya sebenarnya telah lama diemban oleh pegawai di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Melalui penetapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola jabatan fungsional Widyabasa. Secara khusus jabatan fungsional Widyabasa mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang meliputi Widyabasa Ahli Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama.



Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan organisasi atas kompetensi yang harus dimiliki para pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi didasarkan pada peta kompetensi yang disusun tersebut. Pengembangan kompetensi ditujukan bagi pegawai teknis yang

tergabung dalam KKLP maupun pegawai administratif yang mendukung terselenggaranya roda organisasi.

Berkaitan dengan penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, perlu ditempuh langkah-langkah sistematis dalam mewujudkan indeks yang akan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang kebahasaan ini. Penyusunan indeks diagendakan pada tahun awal tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ketika menyusun rencana strategis pada periode 2025--2029.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kongres bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.

	2022	2023	2024

	2022	2023	2024
Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	1. Pengawasan dan Pengendalian (50 lembaga) 2. Pembinaan komunitas literasi (14 lembaga) 3. Penutur bahasa terbina (278 orang) 4. Sosialisasi UKBI adaptif (110 orang) 5. Generasi muda terbina literasi (300 orang)	1. Pengawasan dan Pengendalian (50 lembaga) 2. Pembinaan komunitas literasi (14 lembaga) 3. Penutur bahasa terbina (278 orang) 4. Sosialisasi UKBI adaptif (110 orang) 5. Generasi muda terbina literasi (310 orang)	1. Pengawasan dan Pengendalian (50 lembaga) 2. Pembinaan komunitas literasi (14 lembaga) 3. Penutur bahasa terbina (278 orang) 4. Sosialisasi UKBI adaptif (110 orang) 5. Generasi muda terbina literasi (310 orang)
Pelindungan Bahasa Daerah	Merdeka Belajar: Revitalisasi Sastra (40 orang)	Merdeka Belajar: 1. Revitalisasi Bahasa (50 orang) 2. Revitalisasi Sastra (50 orang)	Merdeka Belajar: 1. Revitalisasi Bahasa (50 orang) 2. Revitalisasi Sastra (50 orang)
Internasional Bahasa Indonesia	1. Fasilitasi Lembaga BIPA (5 lembaga) 2. Penerjemahan (15 produk)	1. Fasilitasi Lembaga BIPA (5 lembaga) 2. Penerjemahan (20 produk)	1. Fasilitasi Lembaga BIPA (5 lembaga) 2. Penerjemahan (20 produk)

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Pengembangan organisasi dan tatalaksana internal, (2) Pengembangan kehumasan dan publikasi, dan (3) Monitoring dan evaluasi program.

	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen	1. Pengembangan organisasi dan tatalaksana 2. Pengembangan kehumasan dan publikasi 3. Monitoring dan Evaluasi	1. Pengembangan organisasi dan tatalaksana 2. Pengembangan kehumasan dan publikasi 3. Monitoring dan Evaluasi	1. Pengembangan organisasi dan tatalaksana 2. Pengembangan kehumasan dan publikasi 3. Monitoring dan Evaluasi

Berkaitan dengan pengembangan organisasi dan tatalaksana, perlu dilakukan *review* (penyesuaian/perbaikan jika diperlukan) dengan perubahan kondisi di lapangan dalam rangka menyiapkan perangkat kerja sebagai alat yang mutakhir untuk melaksanakan kegiatan dalam organisasi. Pengembangan organisasi dan tatalaksana meliputi struktur organisasi, proses bisnis, mekanisme kerja, dan prosedur operasional standar.

Berkaitan dengan pengembangan kehumasan dan publikasi, perlu ditempuh langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian mekanisme kehumasan dan publikasi yang responsif dengan perubahan kondisi lingkungan. Kehumasan dan publikasi ini perlu perhatian khusus karena merupakan ujung tombak dalam berkomunikasi antara pihak internal dengan eksternal dalam hal merancang produk sesuai kebutuhan masyarakat dan mengomunikasikan produk ke masyarakat.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNi bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA	2024
3.	Peraturan tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia	Sebagai rujukan pelaksanaan program penginternasionalan bahasa Indonesia	2023
4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2022
5.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2023
7.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2023
8.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUPI, dan pedoman lainnya	2022
9.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
	Negara Bukan Pajak		
10.	Peraturan tentang tarif PNBP di lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan tarif nol dalam PNBP UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran mahasiswa dan pemangku kebijakan	2023
11.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah	2024
12.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia	2024
13.	Revisi Permendikbud 44 Nomor 2020 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan sasaran penerima banpem agar mencakupi juga komunitas kebahasaan dan kesastraan	2022
14.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjut UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017	2024
15.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2022
16.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2023
17.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional Widyabasa	2022
18.	Permendikbudristek tentang pedoman <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	2022

3.4 Kerangka Kelembagaan

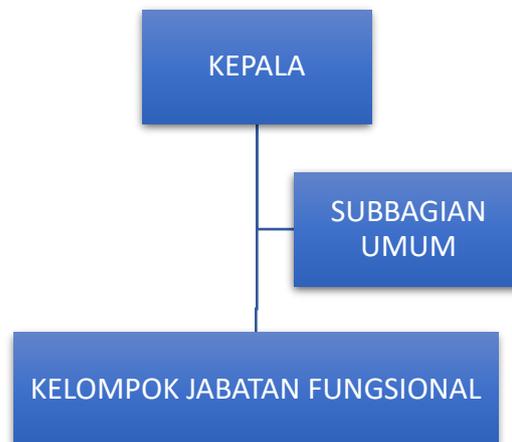
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa sebagai salah satu unit UPT di lingkungan Kemendikbudristek menjadi lembaga strategis dalam mendukung pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Oleh karena itu Balai Bahasa harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi.

Balai Bahasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Kelompok Jabatan Widya Bahasa dan Kepala Subbagian Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa berkoordinasi dengan

1. Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian.
2. pemerintah daerah provinsi.
3. pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

3.4.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pegawai aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 37 pegawai dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) berjumlah 8 pegawai. Pegawai Negeri Sipil Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pejabat struktural sebanyak 2 orang yaitu 1 orang pejabat administrator dan 1 orang pejabat pengawas, fungsional sebanyak 5 orang, dan pelaksana sebanyak 30 orang. Dilihat dari tingkat Pendidikan, pegawai dengan tingkat Pendidikan S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 7 orang, S-1 sebanyak 25 orang, D-3 sebanyak 1 orang, dan SMA sebanyak 3 orang. Berdasarkan pangkat/golongan diketahui pegawai golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 29 orang, dan golongan II sebanyak 3 orang. Secara rinci kondisi Pegawai Negeri Sipil di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pejabat Struktural				Jabatan Fungsional		Tingkat Pendidikan							Pangkat/Golongan			
Eselon																
III/a	III/b	IV/a	IV/b	tertentu	Umum	S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SM P	SD	IV	III	II	Jml
1		1		19	31	1	7	25	1	3	-	-	5	29	3	37

Balai Bahasa Provinsi DIY dalam pengelolaan SDM didukung dengan teknologi informasi untuk mewujudkan SDM yang berintegritas tinggi, profesional, dan kompeten. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan lembaga. Untuk itu, dalam 5 lima) tahun ke depan Balai Bahasa Provinsi DIY diharapkan dapat mendukung terwujudnya SMART ASN sesuai dengan Roadmap SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi, integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality, networking, dan entrepreneurship*. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen pegawai baik melalui mutasi maupun usulan pengadaan pegawai secara transparan untuk mendapatkan talenta terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Balai Bahasa Provinsi DIY dengan jumlah pegawai sebanyak 37 pegawai dalam pengelolaan kepegawaian juga harus memastikan seluruh pegawai tersebut terlayani dengan baik. Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yaitu Balai Bahasa diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya

Manusia aparatur merupakan elemen terpenting yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Balai Bahasa Provinsi DIY.

Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan pengelolaan secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal

3.4.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran reformasi birokrasi Kemendikbudristek 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 dan sebagaimana tertulis dalam Permepan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus melanjutkan dan mer

1. Manajemen Perubahan

Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta pada area manajemen perubahan melakukan tranformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN melalui pengelolaan database menggunakan aplikasi Adabay, yang membantu pengelolaan data untuk mendukung layanan publik, layanan kepegawaian, dan layanan administrasi lembaga.

2. Deregulasi Kebijakan

Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan telah mengidentifikasi dan menganalisis aturan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan agar tidak ada regulasi yang tumpang tindih atau berbenturan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta dalam penataan dan penguatan organisasi telah melakukan evaluasi organisasi dan mengusulkan naskah akademik perubahan organisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

4. Penataan Tata Laksana

Penguatan Tata Laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Adanya SOP, implementtasi *e-office* dalam pengelolaan pemerintahan, dan diterapkannya keterbukaan informasi publik yang diikuti dengan adanya monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM yang dilihat dengan meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatnya disiplin SDM, efektivitas manajemen SDM dan profesionalisme SDM. Dalam penataan manajemen SDM ini, Balai Bahasa Provinsi DIY telah melaksanakan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi berbasis kompetensi, dan penetapan kinerja individu.

6. Penguatan Akuntabilitas

Balai Bahasa dalam rangka penguatan akuntabilitas telah melaksanakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Balai Bahasa dalam rangka penguatan pengawasan telah membentuk unit pengendali gratifikasi sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Balai Bahasa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik dengan cara melakukan evaluasi pelayanan secara berkala.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, Balai Bahasa terus meningkatkan layanan dan produk Balai Bahasa lebih mudah diakses oleh pengguna layanan dan lebih luas jangkauannya.

Dari sisi sumber daya manusia, Balai Bahasa melakukan peningkatan kompetensi secara bertahap bagi seluruh pegawai. Dengan adanya pengelompokan kepakaran diharapkan kebutuhan dan pelaksanaan kompetensi seluruh pegawai lebih maksimal dan nantinya akan meningkatkan kualitas layanan.

3.4.4 Pemenuhan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, Balai Bahasa perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor ideal sebagai tempat kerja dan pelayanan yang aman, nyaman, dan representatif. Kondisi gedung/kantor di Balai Bahasa saat ini kurang ideal, karena (1) kerusakan gedung disebabkan adanya rayap dan (2) belum ada ruang layanan terpadu yang representatif

Untuk mengatasi kerusakan gedung akan dilakukan rehabilitasi gedung/bangunan, dengan Langkah, sebagai berikut:

1. analisis kelayakan gedung/bangunan (dilakukan oleh Dinas PUPR).
2. rehabilitasi gedung (tahap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi).

Sedangkan untuk penyediaan ruang layanan terpadu yang representatif dilakukan langkah, sebagai berikut;

1. pemindahan ruang kerja pegawai
2. renovasi ruang layanan terpadu

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja. Di bab ini sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) Sasaran dan indikator tahun 2020—2021 dan (2) Sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar	Target	
				2020	2021
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
SK	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia				
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	234	1	3
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia				
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	12.300	1000	100
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra				
SK	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik				
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	398	260	340
SK	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina				
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	59.294	1.175	708
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah				
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah				

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar	Target	
				2020	2021
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	0	605	5
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	0	1.605	5
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	0	2	21
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
IKK	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	BB	BB	BB
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90	91	91

4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target		
				2022	2023	2024
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra					
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2	2
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	2.210	40	41	43
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra					
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan					
IKK	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan	Orang	1.175	688	709	731

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target		
				2022	2023	2024
	dan kesastraan					
SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan					
IKK	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lemba ga	260	45	45	45
IKK	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lemba ga	14	14	14	14
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan					
SK	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA					
IKK	Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Lemba ga	5	5	5	5
SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa					
IKK	Jumlah produk penerjemahan	Produk	15	15	97	97
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa DIY					
IKK	Predikat SAKIP Balai Bahasa DIY	Predik at	BB	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa DIY	Skor	91	91	91	91

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur program dan kegiatan kementerian/lembaga. Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan Balai Bahasa tahun 2020—2024 dibagi ke dalam tiga periode berikut ini.

Periode TA 2020

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Harian (juta)
023.13.10	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	8.938,5
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	0
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	0
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	0
5288	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	0
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	8.938,5

Periode TA 2021

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Harian (juta)
023.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.800,8
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	0
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	0
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	3.800,8
023.WA	Dukungan Manajemen	6.353,0
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.353,0
Total		10.153,9

Periode 2022—2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN
------	------------------	--------------------

		PENDANAAN		
		2022	2023	2024
023.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	330,4	346,3	363
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	1.060,3	1.113,5	1.169,6
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	488	2.614,1	2.692,6
023.WA	Dukungan Manajemen			
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	6.091,2	5.710,2	5.644,6
Total		7.970	9.784,3	9.870

BAB V

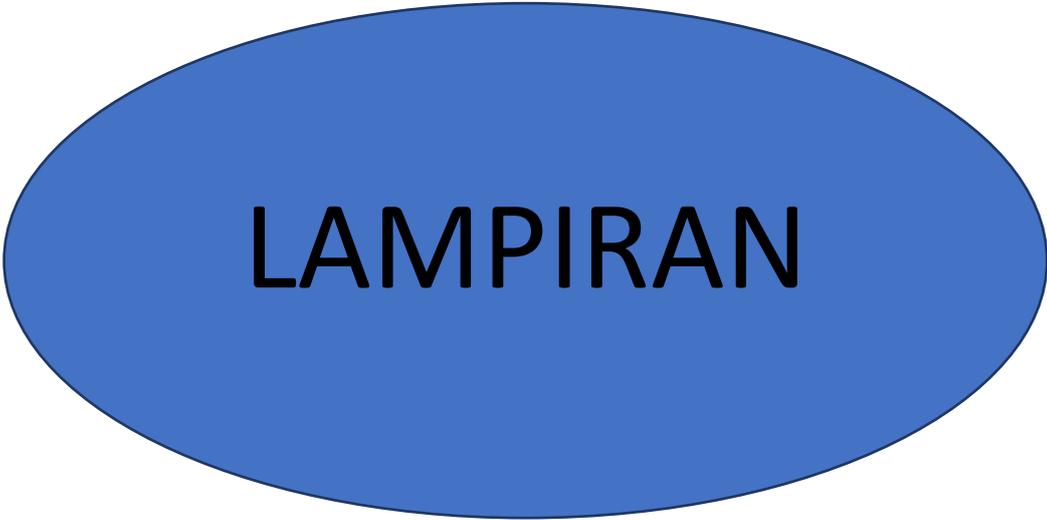
PENUTUP

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020—2024 ini merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana pembangunan jangka menengah nasional/RPJMN (Kepres No. 18 Tahun 2020) dan (2) Rencana Strategis Kemendikbudristek (Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022).

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, semua pihak dapat memberikan kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Dengan melibatkan publik secara lebih aktif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pengelolaan bahasa dan sastra semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi positif dalam menjaga kebinekaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.



LAMPIRAN

DEFINISI OPERSIONAL DAN METODE PENGHITUNGAN

SK : [SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

IKK : [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Unit Pelaksana : KKLK Kamus dan Istilah

Definisi

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode Penghitungan

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun tertentu.

Satuan: Produk

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 2] **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan**

IKK : [IKK 2.1] **Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan**

Unit Pelaksana: KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu), KKLK UKBI, dan KKLK UKBI

Definisi

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut

$$JPT = JP$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan

Satuan orang

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan Indonesia

IKK : [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Unit Pelaksana : KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu)

Definisi

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut. Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
Unit Pelaksana : KKLP Literasi

Definisi

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.

Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitas lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Satuan lembaga

Tipe Penghitungan:

Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : **[SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA**
IKK : **[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)**
Unit Pelaksana : **KKLP BIPA**

Definisi

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Metode Penghitungan

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui lembaga.

Satuan orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : **[SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa Indonesia**
IKK : **[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan**
Unit Pelaksana : **KKLP Penerjemahan**

Definisi

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya).

Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta

peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan produk

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah Indonesia
IKK : [IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
Unit Pelaksana : KKLK Pelindungan dan Pemodernan (Linmod)

Definisi

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan Bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi Bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi Bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur Bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

Konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/ informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$$A = B + C$$

Keterangan:

A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

M = Jumlah penutur Bahasa yang terlibat sebagai informan/ narasumber dalam kegiatan konservasi

N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi Bahasa

$$C = X + Y$$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/ narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

IKK : [IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unit Pelaksana : Kepala Subbagian Umum (KSU)

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri).

Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = (\text{Perencanaan Kinerja}) + (\text{Pengukuran Kinerja}) + (\text{Pelaporan Kinerja}) + (\text{Evaluasi Kinerja})$$

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 7] Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
IKK : [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Unit Pelaksana : Kepala Subbagian Umum (KSU)

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai IKPA (40%) + Nilai EKA (60%)

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

- > 90% Sangat Baik
- > 80%-90% Baik
- > 60%-80% Cukup
- > 50%-60% Kurang
- < %50 Sangat Kurang

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

1. Aplikasi SMART DJA (EKA)
2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)

**CASCADING RENSTRA DAN PK
BALAI BAHASA PROVINSI DIY
TAHUN 2020—2024**

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kriteria Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Pengampu			
(SS.4) Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya	(IKSS 4.1) Rata-rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	(SP 6.5) Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	(IKP 6.5.1) Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	(2021.DDA) Penelitian dan Pengembangan Produk	(DDA.001) Produk Kodifikasi Bahasa	(051) Pemerikayaan Kosakata	Pusbanglin dan UPT			
								(052) Pengembangan Kamus	Pusbanglin dan UPT			
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	(2022.QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	(QDC.001) Penutur Bahasa Terbina	(054) Peningkatan Kemahiran Berbahasa	Pubin dan UPT			
							(QDC.003) Generasi Muda Terbina Program Literasi	(055) Peningkatan Apresiasi Sastra	Pubin dan UPT			
								(051) Pemilihan Duta Bahasa Literasi Penggerak	Pubin dan UPT			
								(052) Pembinaan Literasi Generasi Muda	Pubin dan UPT			
				(IKP 6.5.2) Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	(2022.BDB) Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	(BDB.001) Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	(051) Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum	Pubin dan UPT	
			(053) Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik							Pubin dan UPT		
			(051) Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi							Pubin dan UPT		
										(BDB.002) Komunitas Penggerak Literasi Terbina	(052) Pemberdayaan komunitas penggerak literasi	Pubin dan UPT
											(054) Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Pustanda dan UPT
(IKSS 4.2) Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	(SP 6.7) Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	(IKP 6.7.1) Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Rawan Punah			(2021.QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	(QDC.002) Partisipasi Pelindungan Sastra	(051) Koordinasi antarinstitusi	UPT			
								(052) Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model pelindungan sastra daerah	UPT			
								(054) Peningkatan Kemahiran Berbahasa	Pubin dan UPT			

								(055) Peningkatan Apresiasi Sastra (Musikalisasi Puisi)	Pubin dan UPT	
								(052) Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka	Pubin dan UPT	
								(051) Pemilihan Duta Bahasa Literasi Penggerak	Pubin dan UPT	
								(052) Pembinaan Literasi Generasi Muda	Pubin dan UPT	
					Jumlah Produk Kesastraan Berkembang	(6702.DDA) Penelitian dan Pengembangan Produk	(DDA.001) Produk Penerjemahan	(052) Pelaksanaan Penerjemahan	Pustanda dan UPT	
(SS 5) Meningkatnya Tata Kelola Kemdikbud yang Berkualitas	(IKSS 5.4) Indeks Reformasi Birokrasi Kemdikbud	(SP 1.1) Terwujudnya Tata Kelola Kemdikbud yang Berkualitas	(IKP 1.1.1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Kinerja Kemdikbud	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	(2020.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	(EBA.994) Layanan Perkantoran	(002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
								(EBA.992) Layanan Umum	(051) Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(052) Pengelolaan Perpustakaan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(053) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(056) Layanan SDM	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(057) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(058) Layanan Humas dan Publikasi	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(059) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									(EBA.994) Layanan Perkantoran	(001) Gaji dan Tunjangan
								(EBA.992) Layanan Umum		(054) Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
				Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL/minimal 91	(2020.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	(EBA.994) Layanan Perkantoran	(001) Gaji dan Tunjangan		Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
							(EBA.992) Layanan Umum	(054) Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	

Matriks Semula—Menjadi Sasaran Indikator

Semula			Menjadi		
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian			
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	2	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
					Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
			4	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA	Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah			
		Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	6	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa DIY	Predikat SAKIP Balai Bahasa DIY BB
		Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91			Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa DIY minimal 91

MATRIK SEMULA--MENJADI PADA DEFINISI OPERASIONAL

No	Keterangan	Semula	Menjadi
1	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 1 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra IKK 1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	-	KKLP Kamus dan Istilah
2	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan IKK 2.1 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	-	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu), KKLP UKBI, dan KKLP UKBI
3	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 3 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan IKK 3.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	-	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu)
4	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 3 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan IKK 3.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	-	KKLP Literasi
5	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 4 Meningkatnya pemelajar BIPA IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	-	KKLP BIPA
6	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 5 Tersedianya produk diplomasi bahasa IKK 5.1 Jumlah produk penerjemahan	-	KKLP Penerjemahan
7	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra IKK 6.1 Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	-	KKLP Pelindungan dan Pemodernan (Linmod)
8	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 7 Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi DIY IKK 7.1 Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi DIY	-	Kepala Subbagian Umum (KSU)
9	Memperbaiki Definisi Operasional dengan menambahkan penanggungjawab/Unit pelaksana pada: SK 7 Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi DIY IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa Provinsi DIY	-	Kepala Subbagian Umum (KSU)